



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR 901/I/IV/2016



DPR AKAN SELAMATKAN NASIB NELAYAN LOBSTER



PROYEK HAMBALANG
TAK DITERUSKAN,
KERUGIAN NEGARA
BERTAMBAH



TIGA ISU UTAMA
MENJADI SOROTAN
DPR DAN
KONGRES AS



EKOSISTEM
RAJA AMPAT
HARUS TETAP
TERJAGA



DPR Akan Selamatkan Nasib Nelayan Lobster

Terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Benih Lobster telah membuat 7 ribu nelayan NTB yang menggantungkan hidup pada lobster kehilangan mata pencaharian. Terkait hal tersebut Komisi IV DPR berjanji menyelamatkan nasib nelayan Lobster dengan membahasnya bersama Kementerian KKP.

"Kita akan bawa masalah ini saat Raker dengan KKP agar setiap kebijakan harus dievaluasi dampaknya terhadap rakyat kecil yaitu para nelayan lobster, serta diberi solusi yang adil dan kompensasi yang layak," Kata Ketua Tim Kunker Herman Khaeron saat melakukan

pertemuan dengan Gubernur NTB HM. Zainul Majdi beserta jajaran, di Kantor Gubernur, Senin (21/3/2016).

Herman menambahkan, semestinya yang dilarang adalah praktek ekspor benih lobster bukan proses penangkapan bibitnya oleh nelayan.

"Tingkat kematian (mortalitas) lobster ini sangat tinggi, jadi seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana mengadopsi teknik (teknologi) budidaya lobster yang baik dari pada membuat larangan," harap Herman yang juga politisi Demokrat ini.

Keseriusan DPR dalam menyelamatkan nasib nelayan Lobster terungkap saat Gubernur NTB HM. Zainul

Madji dihadapan Tim Kunker Komisi IV mengungkapkan, dirinya mengkritik keras kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut. Bahkan pihaknya merasa sudah tidak mampu lagi menyelamatkan nasib ribuan nelayan lobster.

"Ada 7 ribu lebih nelayan lobster yang menderita saat ini, saya memohon bapak-ibu dari Komisi IV DPR membantu mencari solusi terbaik untuk menyelamatkan masa depan para nelayan tersebut," pinta Majdi

Majdi menambahkan, sejak lama masyarakat NTB menghidupi anak dan istri dari lobster. Biaya hidup dan pendidikan anak juga didapatkan dari pekerjaan menangkap bibit lobster. "Tapi tiba-tiba turun Permen yang melarang mereka, ini kan pemerintah daerah dan aparat dibenturkan dengan rakyatnya sendiri," pungkasnya ■



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH

Dr. Winantuningtyastuti, M.Si
(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si,
(DEPUTI PERSIDANGAN)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Suratna, M.Si
(Kabag Media Cetak & Media Sosial)

WK. PIMPINAN REDAKSI

Dra. Tri Hastuti
(Kasubag Media Cetak)

REDAKTUR

Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos

SEKRETARIS REDAKSI

Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto

ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistiono, SH,
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli,
Devi Iriandi, Hendra Sunandar,
Surahmad Eko, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Rizka Arianindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Andi M. Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati,
Jayadi Maulana, Arief Rachman,
R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI FOTO

Hasri Mentari

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusanantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350

Fax. (021) 5715341,

e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com

www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN & DISTRIBUSI

PIMPINAN PENERBITAN

Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP
(Kabag Penerbitan)

WK. PIMPINAN PENERBITAN

Mediantoro, SE
(Kasubag Produksi),
Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si
(Kasubag Distribusi)

STAF PRODUKSI

Eko Murdiyanto,
Imam Bangun Sunjono, Barliansyah

STAF DISTRIBUSI & SIRKULASI

Suparmono, Hamdani

Telp. 021-571 5697

Fax. 021-571 5421

Email

penerbitandpr@gmail.com

Banyak Kebijakan Membuat Kualitas Hidup Merosot

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai, masih banyak kebijakan Pemerintah yang membuat kualitas hidup masyarakat merosot. Ironisnya, ketika kebijakan yang disusun Pemerintah itu implementasinya gagal, yang menjadi korban adalah masyarakat.



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

Kita harus cari tahu faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan itu. Merosotnya pendapatan negara adalah karena kapasitas pemerintahan yang rendah," tegas Fahri saat menemui perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2016). Contohnya, tambah politisi F-PKS itu, ketika Pemerintah gagal meningkatkan penerimaan negara, yang dikorbankan adalah masyarakat luas, seperti dicabutnya subsidi, naiknya tarif dasar listrik, dan lainnya.

"Kita harus punya formulasi soal peta permasalahan. Selama pemerintahan ini, banyak kebijakan yang membuat kualitas hidup ini mengalami kemerosotan. Untuk KSPI, kita coba buat kajian bersama," imbuh politisi asal dapil NTB itu.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan, pihaknya menuntut Pemerintah untuk mencabut pasal 44 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Upah, yang intinya terkait kenaikan upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Upah rata-rata Indonesia masih rendah dibanding Vietnam. Kalau dibanding

upah kita tinggi, bohong juga. Penurunan daya beli, karena upah murah, pertumbuhan ekonomi tidak naik juga. Dengan adanya PP ini, mengembalikan rezim kepada upah murah. Pengupahan dikendalikan oleh negara, dan tidak diimbangi dengan subsidi. Ini memberatkan," tegas Iqbal.

Ia juga meminta, ketika Pemerintah merevisi PP itu, hendaknya melibatkan *stakeholder*, yakni serikat buruh, APINDO, Kadin, dan Pemerintah Daerah.

Berikutnya, yang menjadi tuntutan KSPI terkait dengan penghilangan hak berunding serikat buruh terkait kenaikan upah minimum. Padahal kenaikan upah itu diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 Pasal 88 dan 89, mewajibkan adanya perundingan di tingkat Dewan Pengupahan Daerah Provinsi maupun Kabupaten atau Kota.

Hasil perundingan itu kemudian direkomendasikan oleh Bupati atau Walikota kepada Gubernur, untuk menetapkan upah minimum. Didahului dengan dialog seberapa kenaikan upah minimum, berdasar hasil survey.

"Dengan adanya PP itu, hak berunding itu menjadi hilang, dan melanggar konstitusi UU No 13 Tahun 2003, pasal 27 Ayat 2 UUD 1945, Konvensi ILO No 89 tentang Kebebasan Berserikat dan Konvensi ILO NO 89 tentang Berunding, serta Konvensi ILO No 131 tentang Upah Minimum," tuntutan Iqbal.

Selain itu, KSPI juga menyoroti UU Tabungan Perumahan Rakyat, dan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ■

(sf), foto : eno/hr.

(isi berita dan materi foto diluar tanggung jawab Bagian Penerbitan)



Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Audit BPJS Kesehatan

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan Pemerintah harus segera mengaudit secara menyeluruh, terutama kegagalan dari pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ia mengkritisi BPJS Kesehatan yang hendak menaikkan premi per 1 April 2016 mendatang, tidak sejalan dengan prinsip BPJS Kesehatan itu sendiri.

"Kerja BPJS seperti prinsip asuransi pada umumnya. Bukannya menjamin pelayanan kepada masyarakat, sekarang malah mau ditingkatkan preminya. Pemerintah harus meninjau dan mengaudit secara menyeluruh kegagalan BPJS itu, yang menyebabkan persoalan," tegas Fahri usai menerima audiensi perwakilan Dokter Indonesia Bersatu (DIB) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Fahri menilai, masih banyak yang perlu dibenahi di dalam sistem badan yang dipimpin oleh Fahmi Idris itu. Pasalnya, ada indikasi penerimaan premi lebih kecil dibanding klaim. Karena tak dipungkiri, masyarakat berbondong-bondong mendaftar BPJS Kesehatan dan berobat ke rumah sakit. Dengan adanya audit itu, diharapkan ditemukan sebab permasalahan di BPJS Kesehatan.

"Ini harus diaudit secara menyeluruh oleh Pemerintah. Apakah hanya persoalan likuiditas, atau soal kurangnya setoran premi, atau ada soal yang lebih mendasar, yang merupakan kritik orang, kenapa tiba-tiba Pemerintah seperti lepas tangan menyerahkan kepada BPJS Kesehatan dan beroperasi seperti asuransi swasta," tegas Fahri.

Politisi F-PKS ini juga mempertanyakan, apakah BPJS Kesehatan sudah memberikan jaminan kesehatan sebagaimana dituntut Undang-undang Dasar 1945 dan UU Kesehatan, dimana negara menjamin kesehatan masyarakatnya.

"Apakah juga terjadi penurunan kualitas

pelayanan kepada masyarakat, karena dokter itu tidak dicover biayanya, atau yang dicover sangat sedikit, sehingga cenderung menurunkan standar pelayanan, daripada tidak terbayarkan. Sehingga rakyat pada akhirnya jadi korban," tegas Fahri.

Fahri menambahkan, Pemerintah tidak boleh membiarkan BPJS beroperasi sendiri, dan kemudian menaikkan premi, walaupun dilandasi Peraturan Presiden. Mengingat BPJS bukan perusahaan swasta.



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berdialog dengan Dokter Indonesia Bersatu (DIB)

"Ini harus dikaji secara mendalam, dan Pemerintah memberikan solusi yang komprehensif. Jangan ada kedzaliman dalam BPJS ini. Semua lapisan masyarakat harus mendapat jaminan kesehatan," tegas politisi asal dapil NTB itu.

Sementara itu, salah satu perwakilan DIB, dr. Afdhalun Hakim, Sp.JP menegaskan, pihaknya menginginkan perbaikan dalam kebijakan Pemerintah terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini. Walaupun pelaksanaan JKN ini berdasarkan amanat UU, namun harus ada beberapa pembenahan.

"Kami *concern* pada keselamatan pasien. Pasien perlu mendapat pelayanan yang layak dan berkeadilan. Dokter juga harus mendapatkan perlindungan. Jika dokter bekerja di bawah substandar, tiba-tiba terjadi pada pasien, maka dokter yang akan dituntut. Kami sebagai tenaga kesehatan, sangat mengharapkan perlindungan, agar dapat bekerja sesuai

standar," jelas Afdhalun.

Menurut dokter spesialis jantung ini, jika tenaga kesehatan bekerja dengan keterbatasan, oleh karena adanya restriksi daripada biaya pengobatan, tanpa disadari bahwa tenaga kesehatan itu bekerja di bawah substandar, yang beresiko pada pasien dan tenaga kesehatan itu sendiri.

"Ini yang kita harapkan adanya perbaikan. DIB sangat *concern* terhadap masalah kesehatan di masyarakat. Kami berjuang dalam segala lini. Salah satunya melalui kunjungan ke DPR ini, agar segera ada perbaikan dalam sistem JKN," kata dokter yang bertugas di Kepulauan Riau ini.

Hal senada diungkapkan dr. Tengku Afrizal Dahlan. Dokter yang juga Anggota Dewan DPRD Kepulauan Riau itu mengatakan, pihaknya bukan menuntut pembubaran atau peniadaan BPJS Kesehatan, namun menginginkan adanya perbaikan dalam sistem BPJS Kesehatan.

"Masih banyak yang perlu dibenahi. Dua tahun BPJS Kesehatan berjalan, kesannya kita tidak siap. Ini perlu kita perbaiki agar kita siap," tegas dokter yang juga bertugas di Kepri itu.

Dalam kesempatan itu, DIB juga menyampaikan lima tuntutan yang termaktub dalam Panca Tuntutan Reformasi JKN Berkeadilan. Isinya meliputi, menuntut komitmen politik dan anggaran Pemerintah dalam pelaksanaan JKN, menuntut Pemerintah mengutamakan keselamatan pasien dalam era JKN, menuntut Pemerintah untuk menjamin pelayanan kesehatan yang adil dan merata, menuntut Pemerintah untuk menghapus pajak alat kesehatan dan obat yang merupakan komponen penting pelayanan kesehatan, dan menuntut Pemerintah untuk menjamin profesionalisme dokter sesuai etika dan standar profesi serta mendapat perlindungan profesi dan hukum sesuai aturan yang berlaku ■



Ketua DPR Berharap OJK Buat Aturan Turunan UU Penjaminan

Ketua DPR RI Ade Komarudin menggelar sosialisasi UU Penjaminan di Menteng Food Zone, Purwakarta pada Jumat, (25/3). Sosialisasi ini merupakan salah satu agenda Ade Komarudin selama reses di daerah pemilihannya.

RUU Penjaminan ini merupakan inisiatif dari Fraksi Partai Golkar di DPR dan



Ketua DPR RI Ade Komarudin

dalam Rapat Paripurna DPR pada 17 Desember 2015 lalu, telah disahkan menjadi UU. Selanjutnya Presiden mengesahkan UU Penjaminan pada tanggal 15 Januari 2016 dan diundangkan tanggal 19 Januari 2016 dengan Lembaran Berita Negara Nomor 9 tahun 2016.

Akom, sapaan akrab Ketua DPR menjelaskan, UU Penjaminan ini dibuat untuk dapat memperkuat dasar hukum pelaksanaan penjaminan dan juga menyeimbangkan industri penjaminan dengan industri lainnya. "Sehingga terjadi persaingan usaha yang sehat yang pada akhirnya menguntungkan bagi rakyat," tutur Akom.

Lebih jauh politisi senior Golkar ini menjelaskan, UU Penjaminan juga dapat memberikan jaminan kepastian kepada lembaga pembiayaan, apabila terjadi resiko pembiayaan. Oleh karena itu dia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuat Peraturan OJK (POJK)

sebagai aturan turunan dari UU Penjaminan. Meski demikian, ia menghimbau agar OJK berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR sebelum membuat POJK.

"OJK tidak bisa membuat POJK tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR. Sebagai acuan, terdapat 28 amanat pengaturan lebih lanjut dalam POJK di UU Penjaminan," jelas Ketua DPR.

Selain itu, alumni UIN Jakarta itu juga menyebutkan peraturan pelaksanaan UU Penjaminan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tersebut wajib ditetapkan paling lambat satu tahun terhitung sejak UU Penjaminan diberlakukan.

"OJK tidak bisa menafsirkan amanat UU Penjaminan tersebut secara bebas namun harus sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU Penjaminan," tegasnya.

Hadir dalam acara tersebut anggota Dewan Komisiner OJK Ilya Avianti, Sarwono dan Ujang Komarudin yang bertindak sebagai moderator. Para peserta yang turut hadir adalah dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Purwakarta dan ratusan pelaku UMKM se-Kabupaten Purwakarta ■

(f.s.mpl), foto : arief/hr.

Proyek Hambalang Tak Diteruskan, Kerugian Negara Bertambah

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan, jika proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (PSON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat tak diteruskan, dikhawatirkan akan menambah kerugian negara. Pasalnya, selama ini pembangunannya sudah dianggarkan sebesar Rp 1,2 triliun.

"Yang perlu dipahami, bagaimana nasib daripada bangunan itu. Kerugian negara telah muncul. Kalau tidak diteruskan, kerugian negara akan bertambah dan berlarut-larut. Sementara yang bertanggungjawab terhadap pembangunan juga tidak ada," kata Fahri, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Fahri menambahkan, pembangunan kompleks PSON Hambalang seharusnya diteruskan dan mendapat penanganan

secara segera. Menurutnya, yang paling bertanggungjawab adalah Kementerian yang menganggarkan proyek itu, dengan disetujui oleh DPR RI, sebagai pemegang kendali politik anggaran. Presiden pernah menyetujui itu.

"Sekarang yang saya sayangkan, setelah pembangunan mangkrak cukup lama, Presiden Joko Widodo datang ke sana, lalu meninjau, dan mengatakan akan membangun. Padahal di sisi lain ada moratorium pembangunan," imbuah Fahri.

Fahri juga mengkritisi, proses hukum yang terjadi dibalik kasus korupsi Hambalang itu telah menghentikan proses pembangunan. Ia menilai, hal itu bukan hanya terjadi pada PSON Hambalang, tapi juga terjadi di seluruh Indonesia.

"Pimpinan proyek baru dipanggil sekali oleh penegak hukum, langsung semua

distop, mangkrak, dan seolah-olah semua itu tak ada pertanggungjawaban. Padahal, paling tidak setengah anggaran sudah dikeluarkan. Ini sangat membahayakan aset negara kita yang lebih besar. Sehingga kita lupa, ini bukan soal saling suap Rp 1-2 miliar, tapi ada Rp 2,5 triliun yang hilang," papar Fahri.

Politisi asal dapil NTB itu menyimpulkan, kasus-kasus korupsi dan berakibat pada kerugian negara yang permanen, hanya menjadi panggung pencitraan belaka. Padahal hal itu membutuhkan penanganan dan solusi, baik kasusnya itu sendiri, maupun akibat dari kasusnya ■



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

(sf), foto: kresno/hr.



Tiga Isu Utama Menjadi Sorotan DPR dan Kongres AS

Ketua DPR-RI Ade Komarudin, didampingi oleh Ketua Komisi I Mahfuz Sidik (F-PKS) dan Wakil Ketua BKSAP Syaifullah Tamliha (F-PPP), di Gedung DPR, Selasa (29/3/2016) menerima kunjungan Congressional Delegation (CODEL) Amerika Serikat yang dipimpin oleh Matt Salmon dan didampingi dua anggota Parlemen AS yaitu Rep. Cynthia Lummis dan Rep. Scott DeJarlais. Pertemuan bilateral ini, membahas tentang tiga isu utama yang menjadi sorotan antara kedua belah pihak.

Tiga isu utama yang dibahas yaitu, Kerjasama dalam pemberantasan terorisme disertai kampanye perdamaian antara etnis dan umat beragama, kerjasama dalam bidang ekonomi yakni *Trans Pacific Partnership* (TPP), dan kerjasama pembangunan perpustakaan parlemen.

Ade Komarudin (F-Golkar) yang akrab dengan sapaan Akom, mengucapkan terimakasih dan mengungkapkan rasa senang hatinya atas kunjungan kehormatan Ketua Urusan Luar Negeri Kongres Amerika Serikat, dan anggotanya yang juga membidangi *Subcommittee on Asia and the Pacific*.

"Terimakasih atas kehadirannya. Kami ditemani anggota dewan dari partai-partai berbasis Islam yang tidak menyukai kampanye Trump. Selain itu juga ditemani ibu Sekjen. Kami semua sangat senang atas kunjungannya," ungkap Akom, disambut kelakar tawa oleh para delegasi kongres AS, karena sindiran satire untuk Calon Presiden AS Donald Trump.

Menanggapi pernyataan Akom tersebut, Matt Salmon mengungkapkan, bahwa dia juga tidak berkenan dengan kampanye Trump yang sektarian, hanya terkungkung pada satu kelompok saja dan merendahkan yang lainnya.

"Saya yakin kedua institusi kita bisa membawa dunia lebih makmur. Saya dari Negara Bagian Arizona dan saya tidak memilih Donald Trump. Saya juga tidak setuju dengan pandangan Trump. Karena Amerika Serikat merdeka salah satu fondasinya adalah kebebasan beragama.



Ketua DPR Ade Komarudin, Ketua Komisi I, Wakil Ketua BKSAP bersama Kongres AS

Kami menyambut semua orang dengan latar belakang yang berbeda," ungkap Matt Salmon.

Selanjutnya dalam pertemuan, kedua belah pihak sepakat bahwa terorisme adalah musuh bersama, ketentraman dan keamanan dunia sedang diusik oleh kelompok radikal yang melakukan aksi terorisme. Akom menegaskan, segala macam aksi teror di Indonesia akan ditindak dengan undang-undang yang berlaku.

"Semua aksi terorisme akan kami berikan hukuman dengan undang-undang yang ada," papar Akom.

Matt Salmon menilai, terorisme merupakan racun dunia yang harus dihilangkan, karena jaringan terorisme

tidak hanya di satu negara saja, para anggota teroris ada di berbagai negara, oleh sebab itu agar efektif dalam pemberantasan perlu ada kerjasama.

"Itulah sebabnya kita harus kerja sama dengan erat untuk menghilangkan racun ini. Kami ingin bekerja sama dalam menentang terorisme," sambut Matt Salmon atas pernyataan Akom.

Sedangkan persoalan TPP Akom mengatakan, DPR bersama Pemerintah Indonesia akan mengkaji secara seksama, agar potensi ekonomi nasional memiliki kesiapan dalam menghadapi Kemitraan Ekonomi Trans-Pasifik.

Berkenaan dengan rencana DPR yang akan membangun Perpustakaan Parlemen terbesar di Asia Tenggara Pimpinan Delegasi Kongres AS menyambut baik hal tersebut.

"Saya juga tertarik dengan tujuan Bapak yang akan mendirikan perpustakaan parlemen. Karena untuk bisa mengakses sejarah, perpustakaan adalah sarana yang dibutuhkan. Membangun perpustakaan adalah hal yang mulia," ungkap Matt Salmon ■

DPR Minta Masyarakat Waspada Ancaman Non Konvensional

Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon mengingatkan agar masyarakat mewaspada bentuk-bentuk ancaman non konvensional seperti banyaknya imigran gelap di wilayah Bogor, peredaran narkoba, dan potensi gerakan radikal.

Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Kodim 0621 Kabupaten Bogor, guna menyerap berbagai aspirasi dan informasi terkait

persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Bogor pada umumnya, dan seputar kegiatan keamanan yang dilakukan Kodim 0621 pada khususnya.

Kedatangan Fadli Zon beserta rombongan disambut hangat Komandan Kodim 0621 Letkol Czi Dwi Bima Nurahmat, yang didampingi para Danramil dan Perwira di jajaran lingkungan Kodim.

Sebagai anggota Dewan yang berasal dari dapil V Jawa Barat, yang mencakup Kabupaten Bogor, Fadli Zon menekankan



Semua Hakim Jadi Pejabat, Anggaran pun Harus Disesuaikan

Selama ini hakim yang menjadi pejabat negara hanya di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Muncul tuntutan agar semua hakim, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi diangkat sebagai pejabat negara. Anggaran negara pun harus menyesuaikan dengan tambahan jumlah pejabat yang bakal muncul kemudian.

Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani dalam diskusi yang membahas RUU Jabatan Hakim di lobi Nusantara III DPR, Selasa (29/3). Hingga kini, memang, belum ada UU yang mengatur tentang jabatan hakim. Untuk itu, Komisi III menginisiasi RUU ini menjadi RUU prioritas dalam Prolegnas.

Tuntutan mengangkat semua hakim menjadi pejabat negara muncul dari kalangan hakim muda. Mereka ingin para hakim diperlakukan sama sebagai pejabat negara, tidak hanya terbatas pada hakim yang bekerja di MA. Menurut Arsul, anggaran pejabat dalam APBN niscaya akan berubah bila semua hakim ingin diangkat sebagai pejabat negara. Butuh tambahan anggaran yang tidak sedikit untuk dialokasikan.

"Mampukah anggaran negara

kewajiban representasi yang melekat pada dirinya sebagai wakil rakyat.

"Salah satu tulang punggung dari NKRI adalah TNI. Peran TNI ke depan harus lebih besar lagi, sebab telah terjadi pergeseran konsepsi ancaman, yakni dari ancaman konvensional berkembang lebih luas lagi cakupannya menjadi ancaman non konvensional. Sehingga penguatan TNI sangat diperlukan" ujar Politisi F-Gerindra itu Selasa (29/3) di Bogor.

Fadli juga menyampaikan kalau di level nasional, potensi ancaman bisa datang dari kebijakan bebas visa yang tidak resiprokal.

Di kesempatan yang sama, Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Dwi Bima



Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani, Gayus Lumbun dan Margarito Kamis

memenuhi tambahan jumlah pejabat baru itu. Ada 7.500 pejabat negara yang bertambah bila semua hakim diangkat menjadi pejabat," kata politisi PPP ini. Ditambahkannya, sejauh ini tidak ada rujukan yang jelas di semua negara, apakah semua hakim bisa otomatis menjadi pejabat negara.

Masalah krusial lain yang dibahas dalam RUU ini adalah manajemen rekrutmen dan promosi hakim. Ada pula soal pengawasan dan kinerja hakim yang jadi topik bahasan RUU tersebut. Soal mutasi hakim, ungkap Arsul, para hakim di daerah mengeluhkan mutasi yang terlalu lama. Apalagi, dimutasi ke daerah-

Nurahmat memaparkan beberapa hal, diantaranya, di Kabupaten Bogor terdapat 23 Koramil yang membawahi 40 Kecamatan. Dan dalam kegiatannya Kodim sangat aktif melebur bersama masyarakat, ada beberapa kegiatan yang dilakukan seperti bidang teritorial, saat ini Kodim juga tengah membangun jalan yang menghubungkan dua desa di Sukajaya sepanjang 4,5 Km, gerakan Nasional Indonesia Bersih di Desa Cijeruk, serta kegiatan pemberian bantuan bencana alam.



Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat kunjungan kerja ke Kodim 0621 Kabupaten Bogor

"Kabupaten Bogor saat ini juga tengah menghadapi beberapa ancaman bahaya, seperti misalnya bahaya gerakan radikal, baik radikal kiri maupun radikal kanan," tandas Dwi Bima ■

daerah yang sangat jauh. "Mereka telah meninggalkan keluarga terlalu lama," ucap Arsul lagi.

Pada bagian lain, Arsul menyinggung pula soal wacana menurunkan usia pensiun hakim dari 70 tahun menjadi 67 tahun. Pertimbangannya semata agar ada regenerasi. Para hakim karir diberi kesempatan yang luas untuk menapaki karir profesionalnya di dunia peradilan. Sementara itu, pembicara lainnya, Gayus Lumbun seorang hakim agung di MA, sangat mengapresiasi munculnya RUU ini.

Hanya saja, kata mantan anggota DPR ini, perlu dipikirkan pula bagaimana nasib para hakim Ad Hoc yang bekerja di pengadilan khusus seperti pengadilan Tipikor dan pengadilan HAM. Mutasi dan pengangkatan hakim juga kerap tidak tepat. Banyak hakim Tipikor yang begitu masuk MA, malah ditempatkan di kamar hakim militer. "Jadi, banyak penempatan hakim yang tidak tepat," ujar Gayus.

Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis yang juga menjadi pembicara tidak setuju dengan adanya RUU ini. Menurutnya, lebih baik isu-isu dalam RUU ini diintegrasikan saja ke dalam UU yang sudah ada, seperti UU MA. Ia juga menanggapi isu pengangkatan hakim sebagai pejabat negara. Menurutnya, kehormatan hakim bukan pada status pejabatnya, melainkan pada independensinya ■

(mb), foto: andri/hr.

(dep), foto: hamdis/hr.



Komisi X DPR Serap Aspirasi Perguruan Tinggi di Bengkulu

Dalam rangkaian Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI di Bengkulu baru-baru ini, Tim Komisi X melakukan pertemuan di Ruang Rapat Gedung Rektorat Universitas Bengkulu. Selain menyampaikan tentang kebijakan dan perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), Tim Kunker Komisi X juga menyerap aspirasi tentang realisasi Bantuan

Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan berbagai kendala yang dihadapi dunia perguruan tinggi di daerah ini.

Tim diterima Rektor UNIB Ridwan Nurazi, beserta jajarannya. juga Rektor IAIN Bengkulu, Rektor Universitas Dr. Hazairin (UNIHAZ), Rektor Universitas Dehasen (UNIVED), Rektor Universitas Muhamadiyah Bengkulu, dan pimpinan perguruan tinggi swasta lainnya.

"Mengingat kunjungan kami ini waktu yang sangat terbatas ini, kita fokus pada dunia perguruan tinggi, seperti bagaimana realisasi BOPTN, bagaimana realisasi pemberlakuan sistem uang kuliah tunggal (UKT), serta bagaimana kendala yang dihadapi perguruan tinggi yang sangat perlu dilakukan pembenahan-pembenahan ke depan," kata Ketua Tim Kunker Komisi X DPR Sutan Adil Hendra ketika mengawali diskusi.

Rektor UNIB menilai bahwa indikator pembagi BOPTN yang dilakukan pemerintah sebaiknya ditinjau ulang sebab selama ini kurang memenuhi rasa keadilan. "Menurut kami, sebaiknya indikator pembagi BOPTN diubah, bisa berdasarkan jumlah mahasiswa di masing-masing perguruan tinggi misalnya, sehingga memenuhi rasa keadilan," ujar Ridwan Nurazi.

Dia menambahkan, khusus di



Tim kunker Komisi X DPR berdialog dengan Rektor Univ. Bengkulu

Universitas Bengkulu ada beberapa persoalan yang dihadapi ke depan. Oleh sebab itu, berharap Komisi X dapat sama-sama mencari solusi atas berbagai persoalan tersebut.

Di bidang sumber daya misalnya, untuk saat ini UNIB peringkat 10 besar terbaik nasional rasio sumber daya manusia. Namun persoalannya, 5-10 tahun ke depan, UNIB akan menghadapi pensiun besar-besaran. Sedangkan rekrutmen sumber daya melalui tes CPNS jumlahnya sangat minim setiap tahun.

Di bidang sarana dan prasarana, UNIB tengah mengusulkan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan. Ini untuk memenuhi amanah undang-undang, menyusul telah berdiri dan beroperasinya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di UNIB.

"Karena ini adalah amanah undang-undang kami berharap Komisi X dapat mendorong pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan di Universitas Bengkulu," ujarnya.

Persoalan berikutnya, karena saat ini UNIB telah menerapkan Sistem Badan Layanan Umum (BLU) sementara sumber-sumber pendapatan masih sangat terbatas, maka diharapkan agar pembayaran remunerasi staf/karyawan atau tenaga kependidikan dapat dikembalikan

ditanggung pemerintah pusat menggunakan rupiah murni.

Menanggapi hal ini, usai pertemuan Ketua Tim Kunker berkesimpulan bahwa pemerintah pusat harus segera sepenuhnya ikut masuk dalam proses pembangunan dan pengembangan UNIB.

"Jadi secara umum saya melihat disini pemerintah pusat melalui APBN harus

hadir di dalam menunjang pendidikan yang berkualitas terutama pendidikan tinggi dan Kementerian Ristek Dikti terus meningkatkan beasiswa Bidik Misi dan anggaran-anggaran yang lain termasuk pengadaan staf yang diminta Rektor. Menurut informasi, selama ini APBD belum ada sama sekali yang diperuntukkan dalam membentuk anggaran perguruan tinggi ini, ini yang harus mendapat perhatian" pungkas Sutan ■

(ray), foto:ray/hr

Dalam kasus penanganan terorisme Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III Supratman Andi Agtas berkeyakinan penanganan terorisme melalui operasi Tinombala segera terselesaikan.

"Kita memberikan kepercayaan penuh kepada polda untuk menjalankannya secara baik, kami yakin bisa terselesaikan," kata Supratman, saat Tim Kunker Komisi III DPR melakukan pertemuan dengan Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Rudy Sufahriadi, di Palu, Selasa (22/3/2016).

Senada dengan Supratman, anggota Komisi III DPR Sarifuddin Suding yang ikut serta dalam rombongan menjelaskan, dirinya memberikan apresiasi kepada Polda Sulteng bersama TNI dalam operasi Tinombala ini.



Perluasan Areal Persawahan Harus dengan Desain

Rencana pemerintah yang menargetkan satu juta hektar lahan sawah baru dalam lima tahun ke depan, harus ada CPCL dan desain lokasi terlebih dahulu.

Anggota Komisi IV DPR RI M. Nasyit Umar menegaskan hal tersebut di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (22/3), saat mengikuti rangkaian kunjungan kerja. "Saya tidak menginginkan tanpa desain dalam cetak sawah baru, karena itu menyalahi teknis pelaksanaan perluasan sawah," ujarnya.

Politisi Partai Demokrat itu, menyatakan, perlu koordinasi yang baik antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk merealisasikan target cetak sawah baru. Sebagai mantan Kepala Dinas PU di Sulawesi Selatan, ia tahu betul teknis bagaimana memperluas areal persawahan. Cetak sawah harus dibarengi dengan pembangunan irigasi atau mencetak sawah pada areal irigasi yang sudah ada untuk dikembangkan.

"Perluasan areal sawah harus

mengutamakan areal yang memang sudah beririgasi. Harapannya, kelak masa panen yang tadinya satu kali, bisa dua kali dalam setahun. Hasil produksi tentu jadi meningkat. Bisa dibayangkan bila target pemerintah satu juta hektar menghasilkan enam ton, berarti bisa dua kali panen dalam setahun. Berarti pula 2 X 6 juta ton sama dengan 12 juta ton setahun. Ini akan membantu pemerintah untuk mempercepat swasembada beras ke depan," ungkap Nasyit.

Ia mengaku punya data lengkap seberapa banyak areal yang perlu dan potensial untuk dikembangkan menjadi areal persawahan. Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR pasti juga punya data itu. Nasyit sendiri mengaku sudah mengingatkan Mentan bahwa untuk perluasan tahun 2016 harus diawasi, disurvei, diukur, kemudian didesain. Berdasarkan itulah cetak sawah dilakukan.

Dijelaskan Nasyit, pada 2015 program cetak sawah baru sebanyak 23 ribu hektar sudah terealisasi yang



Anggota Komisi IV DPR RI M. Nasyit Umar

bekerja sama dengan TNI AD. Kemudian pada 2016 ditargetkan kurang lebih 200 ribu hektar, sepuluh kali lipat dari target 2015. Anggarannya mencapai Rp 3,8 triliun. Selama ini petani memang tak sanggup mencetak sawah baru dengan biaya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah menganggarkan biaya cetak sawah di seluruh Indonesia ■

(mb), foto: huseny/hr.

DPR Yakin Operasi Tinombala Terselesaikan



Tim Kunker Komisi III DPR RI dipimpin Supratman Andi Agtas saat Kunjungan ke Kapolda sulteng

"Saya kira langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam pemberantasan terorisme, patut kita apresiasi, kita hargai karena sudah mengarah kepada prosesnya, jaringan Santoso juga sudah teridentifikasi, jadi tinggal bagaimana upaya penangkapan yang bersangkutan," harapnya.

Menanggapi pernyataan tersebut Kapolda Brigjen Pol Rudy Sufahriadi mengatakan, tugas Kapolda di Sulteng ini menjadi tugas yang paling besar. "Saya mempunyai tugas dan target

yaitu mengejar Santoso oleh karena itu saya harus berkonsentrasi," jelasnya kepada Parlemen usai melakukan pertemuan dengan Komisi III.

Ia menambahkan, dirinya berharap operasi Tinombala di Poso segera dituntaskan. "Saya ingin Santoso ditangkap hidup-hidup agar bisa bercerita apa yang sebenarnya terjadi dan maunya apa," tegas Rudy.

Pertemuan yang berlangsung di aula Polda ini dipimpin oleh Ketua tim rombongan Supratman Andi Agtas yang dihadiri jajaran anggota Komisi III. Sementara di jajaran Polda tampak hadir Wakapolda Kombes Pol Leo Bonalubis, dan jajaran institusi kepolisian Palu, serta hadir pula Kepala Badan Narkotika Provinsi Kombes Pol Djoko Mardjanto dan jajarannya ■

(mi,nt), foto: rum/hr.



Pemerintah Harus Hadir Atasi Pergulaan Nasional

Pemerintah harus segera hadir dalam mengatasi masalah pergulaan nasional. Yakni dengan menetapkan harga gula yang mengacu pasar internasional atau memberikan instruksi kepada PT.Perkebunan Nusantara dengan membeli hasil panen para petani tidak kurang dari harga Rp 9000,00/kg.

"Permasalahan kurangnya produksi Gula Kristal Putih (GKP) Nasional tidak kunjung selesai, saya perhatikan dari tahun 2000 sampai tahun 2016 tidak ada kenaikan, apalagi kalau kita berbicara swasembada gula masih jauh dari harapan" kata Anggota Komisi VI Abdul Wachid bersama Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR saat RDPU dengan PT.Perkebunan Nusantara dan PT. RNI di Hotel Gumaya, Semarang, Selasa (29/3).

Menurut data yang dipaparkan PT. PN, lanjut Wachid, produksi GKP Nasional pada tahun 2016 baru mencapai 2,78 juta/ton, sedangkan kebutuhan GKP Nasional 2,98 juta/ton, masih defisit 193 ribu/ton.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab belum tercukupinya kebutuhan gula nasional. Antara lain, Pemerintah mengeluarkan izin impor gula rafinasi yang terlalu banyak, hal ini mengakibatkan gula lokal kalah bersaing.

Faktor berikutnya, kata Wachid, kondisi cuaca pada tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami kekeringan yang panjang, sehingga tanaman tebu banyak yang mati. "Saya akui memang cuaca juga menjadi kendala, tapi seharusnya bisa diatasi, karena saat ini sudah zamannya teknologi. Jika ini menjadi penghambat, Komisi VI siap membantu" tekan politisi F-Gerindra itu.

Selain itu, rendemen saat ini masih 7 persen, kalah jauh dengan Thailand, harga

jualnya saja Rp.6000. Jika dihitung memang lebih murah gula impor dibanding produksi sendiri. Karenanya pemerintah memberikan keleluasaan izin impor terhadap gula rafinasi untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Dalam kesempatan yang sama,



Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wachid

anggota Komisi VI, Eriko Sotarduga mengatakan, jika berkaca pada pertanian tebu di Australia, dengan peralatan yang tidak jauh beda dengan PT.PN dan PT.RNI, mereka mampu memproduksi 100 ton/hektar dengan rendemen 9-12 persen.

"Jadi sebenarnya kita juga bisa seperti Australia. Kalau memang permasalahan dana, sekarang sudah banyak Bank BUMN yang bisa mencover hal itu. Atau jika pabriknya sudah tua, kalau perlu kita bangun yang baru" ungkap politisi F-PDIP itu.

Dirut PT.PN XI, Dolly P Pulunga membenarkan masalah anomali cuaca, jumlah tebu yang akan dikeloka kemungkinan akan turun sekitar 20-25 persen. Untuk mengatasi hal itu, pihaknya akan menggunakan teknologi mekanisasi *speeding up* kualitas, diharapkan *off farm* meningkat dengan target 1,5 jt ton.

Dirut PT.PN III, Bagas Angkasa menjelaskan solusi permasalahan

pergulaan nasional, perlu adanya perhitungan proyeksi kebutuhan gula nasional secara tepat (konsumsi langsung dan industri) bersama-sama antara Kementerian terkait (Perdagangan, Pertanian, dan BUMN).

Selain itu, perlu dibuat kartu petani tebu rakyat untuk memudahkan pengawasan dan peningkatan pelayanan terhadap petani tebu rakyat di wilayah kerja pabrik gula.

"Kami juga mengharapkan pengawasan dan sanksi tegas terhadap produsen gula rafinasi, agar gula rafinasi tidak merembes langsung ke pasar, sehingga tidak menjatuhkan harga GKP" jelasnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Direksi PT.PN II, PT.PN VII, PT.PN IX, PT.PN X, PT.PN XII, PT.PN XIV, dan PT.RNI

(Uk,mp), foto : jakwa/hr

Menyusul kapal ikan Cina yang menyusup wilayah perairan Indonesia dekat kepulauan Natuna, sebenarnya sudah menjadi bom waktu sejak lama. Sikap protes pemerintah Indonesia diapresiasi. Tapi harus diwaspadai, kemungkinan kejadian serupa akan terulang.

Perairan Natuna yang kaya dengan sumber daya alam (SDA) selalu menjadi incaran banyak negara yang berbatasan. Klaim sepihak lewat kapal ikan asing yang menyusup menjadi ancaman serius atas kedaulatan NKRI. Anggota F-Gerindra DPR RI Heri Gunawan memandang serius persoalan ini. Katanya, kapal *coast guard* Cina yang menghalang-halangi kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di wilayah NKRI merupakan bentuk pelecehan kedaulatan.

Apalagi, klaim Cina tentang *traditional fishing zone* sebenarnya tidak dikenal dalam The United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS). *Traditional fishing right* harus atas kesepakatan bersama. Selama ini



Pemda DIY Harus Proaktif Daftarkan Merek dan Paten Produk Lokal

Anggota Komisi VI DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk proaktif dalam pendaftaran merek dan paten dari produk lokal.

Menurutnya, hal ini sangat penting karena Indonesia sekarang telah memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka perlu ada strategi agar produk Indonesia dapat mempunyai daya saing dengan produk luar negeri.

"Pemerintah daerah DIY harus peka, sejauh mana Pemerintah harus mendaftarkan produknya, agar tidak dicaplok oleh negara lain. Karena banyak yang sebenarnya warisan negara kita diakui dan dipatenkan oleh negara lain," kata Eem Marhamah, saat pertemuan dengan jajaran Pemda DIY, dalam



Anggota Komisi VI DPR RI Neng Marhamah Zulfa Hiz

rangkaian kunjungan kerja Komisi VI DPR RI, di Ghedong Pracimosono, Yogyakarta, Senin (28/3/2016).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini

menjelaskan bahwa DPR bersama Pemerintah sedang melakukan pembahasan revisi terhadap Undang-Undang tentang Merek dan revisi UU tentang Paten.

Terkait revisi UU tentang Merek, dijelaskannya tentang rencana Pemerintah untuk meratifikasi Protokol Madrid. Oleh karena itu, hal-hal yang sangat terkait dengan kondisi geografis harus segera ditindaklanjuti.

"Yogyakarta dan daerah sekitarnya banyak sekali indikasi geografis ini. Ada salak pondoh dan lain sebagainya. Hal ini tentunya pemerintah daerah harus peka, sekarang harus jemput bola," tegasnya.

Hal ini, menurutnya, juga harus diikuti dengan standarisasi produk nasional (SNI) agar produk Indonesia bisa mempunyai daya saing dengan produk luar negeri ■

(as), foto: odjite/hr

Sengketa Natuna Sudah Jadi Bom Waktu

tidak ada kesepakatan dengan Cina. "Saya mengapresiasi sikap KKP dan Kemenlu yang telah melakukan protes. Namun, ke depan sikap Cina itu sangat bisa jadi akan terulang bila pemerintah Indonesia tidak mengambil sikap tegas dan tuntas," katanya saat dihubungi Senin (28/3).

Konflik di perairan Natuna, sambung Anggota Komisi XI ini, bukan sekadar *illegal fishing*, tapi merupakan pencaplokan sistematis untuk tujuan-tujuan jangka panjang. "Sengketa Natuna nampaknya merupakan bom waktu. Konflik Natuna adalah soal perebutan sumber daya alam. Selain minyak bumi, wilayah itu menyimpan cadangan gas alam terbesar di dunia. Banyak ahli mengklaim Natuna adalah surga energi terbesar di dunia yang bernilai ekonomi tinggi."

Apa yang dilakukan Cina di Natuna, tidak saja melecehkan kedaulatan RI, tapi

juga bisa merupakan bagian dari upaya sistematis Cina untuk mencaplok Natuna karena motif penguasaan SDA. "Rasanya Cina akan terus ngotot mencaplok Natuna, karena mereka tahu akan untung besar dari pendapatan gas. Sedang kita buntung," tandas Heri lebih lanjut.

Heri mengungkapkan, di Blok Natuna D-Alpha, misalnya, tersimpan cadangan gas dengan volume 222 triliun kaki kubik (TCF). Cadangan itu tidak akan habis hingga 30 tahun. Sementara potensi gas yang *recoverable* di Kepulauan Natuna sebesar 46 TCF atau setara 8.383 miliar barel minyak. Bila digabung dengan dengan minyak bumi, terdapat seitar 500 juta barel cadangan energi hanya di blok tersebut. "Jika diuangkan, kekayaan gas Natuna mencapai Rp6.000 triliun. Nilai itu sama dengan tiga kali lipat APBN saat ini," ujarnya.

Ditambahkan politisi muda dari dapil Jabar IV ini, perusahaan-perusahaan minyak asing pernah bercokol di Natuna dan meraup untung besar. Sebut saja, Petronas (Malaysia), ExxonMobil (AS), Chevron (AS), Shell (Inggris-Belanda), StatOil (Norwegia), Eni (Italia), Total Indonesia (Prancis), dan China National Petroleum Corporation (Cina) ■

(mh), foto: arief/hr



Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan



Minimnya Pasokan Listrik, Problem Berat UN Online di Malut

Kepala Sekolah SMA Negeri I Ternate Ramli Kamaludin mengemukakan, hambatan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) atau lebih dikenal UN *Online* di Maluku Utara lantaran terbatasnya pasokan listrik sehingga voltasenya naik turun. Ketika diadakan simulasi beberapa waktu lalu dari 110 unit komputer, 8 komputer anjlok.

Demikian salah satu temuan Tim Komisi X DPR dipimpin anggota FPDJ Perjuangan Isma Yatun ketika melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara, di Ternate Senin (21/3).

Di Provinsi ini UN Tingkat SMA/SMK sederajat, UN akan dilaksanakan serentak pada tanggal 4-10 April diikuti 14.910 siswa. Yang menarik, pada UN tahun ini untuk pertama kali menggunakan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) atau UN *Online*. Dari 333 SMA/SMK/MA sederajat di Malut, hanya 17 sekolah atau sebanyak 2.436 siswa yang menggunakan UN *Online*. Keluhan lain disamping gangguan listrik juga minimnya jumlah laboratorium. Khusus di kota Ternate, hanya ada 7 sekolah yang melaksanakan UN *Online* dan hanya satu sekolah swasta yaitu SMA Muhammadiyah.



Anggota Komisi X DPR RI Isma Yatun berdialog dengan Kepsek SMAN 1 Ternate

Ketua Tim Kunker Isma Yatun menyatakan temuan ini bermanfaat, masukan ini jangan sampai merugikan masyarakat. Tim Komisi X yang terdiri Isma Yatun, Asdi Narang dan Sofyan Tan dari FPDJ Perjuangan, Noor Achmad dari FPG, Venna Melinda dan Muslim (FPD), Nurhasan Zaidi (FPKS), SY Anas Thahir (FPP) dan Dadang Rusdiana (F Hanura) tampak antusias menyapa para siswa SMA Negeri I Ternate.

" Bagaimana persiapan menghadapi UN? tanya anggota Tim Kunker Muslim

yang dijawab serempak siswa-siswi " Siap Pak. " Jangan takut, kenapa takut, justru yang justru harus hati-hati karena yang menentukan lulus adalah ujian sekolah," tambah politisi Demokrat asal Aceh ini. Suasana yang sama juga dijumpai saat Tim Komisi X mengunjungi SMA

Al-Khairat, mereka menyatakan kesiapannya menyambut UN.

Kepada para siswa-siswi, Isma Yatun berharap, dalam UN nanti berlangsung lancar, semoga anak-anaknya lulus 100 persen, guru-gurunya semangat, sehat dan selalu menjalankan tugasnya dengan baik. Yang membanggakan dari SMA Ternate ini ada yang diterima di ITB. " Ini luar biasa sebab masuk ITB sangat berat, dari ratusan ribu hanya beberapa orang saja yang diterima," pungkas Isma Yatun ■

(mp) foto: Mastur/hr.

Museum Rempah-Rempah Seharusnya Jadi Ikon Malut

Ketua Tim Kunker Komisi X DPR Isma Yatun mengharapkan, Museum Rempah-rempah di Ternate Maluku Utara menjadi salah satu ikon wisata di Propinsi tersebut. Palsanya museum tersebut mempunyai nilai sejarah yang strategis. Komisi X yang saat ini sedang membahas RUU Kebudayaan, mendapat pelajaran berharga termasuk kunjungannya ke Kesultanan Ternate.

" Kesultanan ini sudah menjalankan azas demokrasi sejak 800 tahun yang lalu, Ini harus tetap dilestarikan sampai

dengan anak cucu kita selanjutnya. Juga Museum Rempah-rempah harus kita pikirkan bagaimana museum bisa menarik pengunjung, tidak hanya untuk masyarakat Indonesia tetapi juga mancanegara. Ternate identik dengan rempah-rempah," katanya saat menyampaikan sambutan dalam pertemuan dengan Pemrov Malut baru-baru ini.

Bahkan politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, " Museum rempah-rempah seharusnya menjadi ikon buat Provinsi



Ketua Tim Kunker Komisi X DPR RI Isma Yatun kunjungi museum rempah2 di Malut



Ekosistem Raja Ampat Harus Tetap Terjaga

Anggota Komisi X DPR RI Dwita Ria Gunadi khawatir, semakin meningkatnya kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara, maupun wisatawan mancanegara, dapat merusak ekosistem alam di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.



Anggota Komisi X DPR RI Dwita Ria Gunadi

Pasalnya, Raja Ampat memiliki potensi wisata yang sangat menakjubkan dan harus tetap terjaga.

"Jangan sampai kunjungan wisata mengganggu ekosistem yang ada di Raja Ampat, karena di sana memiliki banyak keunikan, terutama alam dan budayanya," tegas Ria, usai mengunjungi Batu Pensil, salah satu destinasi wisata di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Selasa (22/3/2016).

Selain ekosistem, politisi F-Gerindra ini juga khawatir, kunjungan wisatawan i t u juga mengganggu kebudayaan yang sudah ada di Papua Barat. Ia berharap, kebudayaan lokal jangan sampai terpengaruh dengan hadirnya wisatawan yang berasal dari luar bumi cenderawasih.

"Jangan sampai kedatangan kunjungan wisatawan, menggeser kebudayaan yang ada," imbuh Ria.

Di satu sisi, Ria juga

menyoroti mahal biaya untuk kunjungan wisata ke Raja Ampat. Dirinya berharap, Pemerintah Daerah setempat dapat membuat regulasi, agar kunjungan ke Raja Ampat dapat dipermudah dan dipermurah, terutama untuk wisatawan nusantara.

"Bagaimana wisnus mau menikmati keindahan alam negaranya sendiri, jika biaya ke Raja Ampat serba mahal. Dan sebaiknya, sebelum wisatawan berangkat menuju Raja Ampat, mencari informasi mengenai biayanya, jadi jangan sampai setelah di sana, kekurangan biaya," kritisnya.

Walaupun Raja Ampat dikatakan sudah dikenal di berbagai belahan dunia, politisi asal dapil Lampung itu juga berharap agar promosi tetap digencarkan. Sehingga, menjadi pilihan wisatawan, selain ke Bali. "Namun dengan catatan, diimbangi juga peningkatan fasilitas dan sumber daya manusia," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Yusdi Lamatenggo menerangkan, dari 1846 pulau di Papua Barat, hanya 35 pulau yang berpenduduk.

"Di mata wisatawan, Raja Ampat sudah sangat terkenal, bahkan juga sudah dikenal di dunia. Raja Ampat menjadi terkenal, karena memiliki keanekaragaman hayati terlengkap di dunia," jelasnya.

Ditambahkannya, Raja Ampat memiliki 1247 jenis ikan, 533 jenis koral dan 699 molusca, hingga pari manta. Selain keindahan bawah laut, Raja Ampat juga memiliki hutan yang masih perawan, dan 2 burung cenderawasih endemik.

Kunjungan kerja ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS), dan diikuti oleh Anggota Komisi X DPR, diantaranya Wiryanti Sukamdani (F-PDI Perjuangan), dan Bambang Sutrisno (F-PG). Dari F-Gerindra ada Nuroji dan Sri Meliyana, kemudian F-PAN diwakili Laila Istiana dan Yayuk Basuki. Berikutnya Lathifah Shohib dan Krisna Mukti dari F-PKB, Elviana (F-PPP), dan Ferry Kase (F-Hanura)■

Malut". Tim Komisi X pada acara kunker ini juga berkesempatan mengunjungi Benteng Seribu -Fort Oranye.

Sedangkan di bidang pendidikan, Tim Komisi X berkesempatan mengunjungi beberapa sekolah dan Univeristas Khairun, guna menyerap apa saja yang bisa diperjuangkan di pusat. Pendidikan menurut Komisi X, sebagai cikal bakal pembinaan SDM. Sesuai Nawacita Presiden Jokowi pendidikan dan kesehatan adalah hal utama yang harus dikerjakan.

"Kami sadar hambatan listrik dengan byar-pet di Malut, sehingga berat untuk melaksanakan kegiatan, ibaratnya sekarang semua tergantung listrik. Dengan kedatangan Komisi VII bisa membawa manfaat bagi masyarakat Malut,"

tegasnya.

Wakil Gubernur Maluku Utara M. Natsir Thaib dalam kesempatan ini mengemukakan, Indonesia adalah zamrud katulistiwa dan batu permata berasal dari Maluku Utara yaitu batu bacan. Ironisnya Desa Bacan sendiri tak memiliki listrik tapi batunya membumi sampai ke luar negeri.

Malut adalah Propinsi Kepulauan dengan 820 pulau dan baru 10 persen yang berpenghuni. "Memang benar Malut terkenal dengan rempah-rempah, sampai ke daratan Eropa. Mereka meninggalkan sejarah yang luar biasa, Malut terkenal dengan Provinsi seribu benteng dan seribu pulau," tambah Natsir■

(mp) foto: mastur/hr.

(sfm) foto:sofyan/hr.



Peredaran Narkoba Di Lapas Harus Cepat Direspon

Ketua Tim Kunker Komisi III DPR Mulfachri Harahap menjelaskan peredaran narkoba di lapas merupakan masalah baru yang harus segera direspon dengan cepat, dan perlu diketahui lebih dari 60 persen narapidana di Indonesia merupakan napi dengan kasus narkoba.

"Yang lebih mencengangkan adalah mereka yang sedang menjalani hukuman, dari dalam penjara masih bisa mengendalikan perdagangan narkoba," kata Mulfachri di Padang, Senin (21/3).

Menurut Mulfachri, sebenarnya bukan hanya peredaran narkoba di dalam tahanan yang menjadi masalah, tetapi juga kemampuan mereka untuk mengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara dengan jumlah yang fantastik yang perlu menjadi perhatian bersama.

Lebih lanjut Mulfachri menegaskan bahwa saat ini Indonesia sedang darurat narkoba, maka perlu sebuah perencanaan yang lebih baik lagi untuk melakukan perang besar melawan narkoba, sehingga Negara tidak kalah melawan narkoba.

"Kita (negara-red) tidak boleh kalah dalam menghadapi para penjahat narkoba baik yang tidak terorganisir apalagi yang terorganisir, negara tidak boleh kalah. Oleh sebab itu semua titik lemah yang bisa



Tim Kunker Komisi III DPR RI saat meninjau lapas di Padang

membuat kalah, ketika kita berhadapan dengan mereka harus kita antisipasi sejak awal jika tidak eksistensi kita sebagai suatu bangsa akan pudar," tegas Mulfachri yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

"Lapas merupakan salah satu bagian penting yang harus menjadi perhatian apabila kita ingin sukses melakukan pemberantasan narkoba di negeri ini," tambahnya.

Politisi PAN ini, kembali menegaskan, bahwa Indonesia tidak boleh anggap remeh dalam menghadapi masalah yang sangat serius ini, jika tidak Indonesia akan menghadapi masalah yang disebut dengan

Lost Generation atau kehilangan generasi yang potensial dan kemudian akan rapuh sebagai sebuah bangsa.

"Kejahatan narkoba bukan sekedar kejahatan kriminal biasa namun lebih dari itu, saya melihat ini sebagai desain atas apa yang sering disebut kalangan sebagai *proxy war* atau perang simetris," ungkapnya.

Mulfachri berharap dengan penetapan status BNN sama dengan Kementerian, maka kewenangan yang semakin besar dimiliki BNN bias dijadikan sebagai komando dalam menghadapi perang besar melawan narkoba.

Indonesia saat ini tidak hanya sebagai negara yang menjadi salah satu tempat peredaran narkoba bahkan ditemukan beberapa pabrik pembuatan narkoba. Permasalahan yang sangat serius juga muncul ketika beredarnya narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas), dan di balik jeruji masih terjadi transaksi dan peredaran narkoba ■

(skr.nt) foto : singgih/hr.

Pelaku UKM di Dolly Harus Terus Didampingi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Malik Haramain berharap pemerintah terus dampingi warga yang pernah menggantungkan hidupnya di Dolly. Hal tersebut diungkapkannya saat meninjau bekas lokalisasi prostitusi Dolly, Surabaya Jawa Timur, Senin (21/3).

"Kawasan Dolly ini menurut pak Sekda tadi sudah diubah menjadi sentra industri. Para mantan pekerja di Dolly pun telah bertransformasi menjadi pelaku UKM (usaha kecil menengah). Untuk itu saya berharap selain proses

pemberdayaan berupa pemberian keterampilan, pemerintah juga harus terus mendampingi mereka dengan membantu mendistribusikan produk dan kerajinan yang mereka hasilkan," ungkap Malik, begitu ia biasa disapa.

Sementara itu anggota Komisi VIII DPR, Desi Ratnasari mengatakan pemerintah juga harus memfasilitasi pendaftaran merek pada produk mereka. Hal ini diperlukan untuk



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Haramain meninjau UKM Dolly Di Jatim



Dewan Minta Pemerintah Tunda Kenaikan BPJS

Anggota Komisi IX DPR RI dari F-PPP Muhammad Iqbal minta pemerintah menunda memberlakukan Perpres No. 10 tahun 2016 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan, yang rencananya akan diberlakukan mulai 1 April 2016 mendatang. Selain memberatkan masyarakat peserta BPJS khususnya kelas III, juga pelayanan kesehatan rumah sakit (RS) peserta BPJS masih banyak yang mengecewakan.

"Jangan hanya karena menyatakan defisit Rp 5,8 triliun, lalu Presiden RI mengeluarkan Perpres BPJS tersebut, khususnya terkait pasal 119 soal kenaikan iuran sampai Rp 30 ribu, dan Rp 50 ribu. Mestinya yang dinaikkan itu hanya kelas I, bukan kelas III," tegas Muhammad Iqbal dalam dialektika demokrasi soal kenaikan iuran BPJS bersama Direksi BPJS Bayu Wahyudi dan Koordinator BPJS Watch Indra Munazwar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2016).

Selain masih banyak peserta BPJS mandiri yang tidak terdata dengan baik oleh Kemenkes dan Kemensos RI, Perpres BPJS tersebut juga harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. "Belum

lagi masalah pelayanan khususnya di daerah, yang masih mengecewakan masyarakat, maka iuran itu pasti makin memberatkan," ujarnya.

Dengan demikian, kunci sukses tidaknya pelayanan kesehatan melalui BPJS tersebut kata Iqbal, kuncinya ada di pemerintah. "Bagaimana politik kesehatan pemerintah? Kalau mau serius, maka pelayanan BPJS Kesehatan itu pasti akan beres," pungkasnya.

Tapi kata Bayu, keluarnya Perpres tersebut pertama, justru untuk penyesuaian tarif guna kesinambungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang pelaksanaan pengelolaannya oleh BPJS. Kedua, dinamika perkembangan anggaran BPJS yang memprihatinkan, dan jika tidak dinaikkan BPJS bisa bangkrut, kolaps, sehingga tidak bisa melayani masyarakat secara maksimal.

Untuk itu, perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) tahun 2011 dan 2012 yang ikut membayar juga sebagai dana untuk membantu peserta BPJS yang tidak mampu (miskin). Sementara Pemda hanya mengcover Rp 5 juta. Karena itu, kalau dalam 2 tahun ini masih ada kekurangan di sana-sini, masih wajar. Bahwa Perpres itu untuk penyesuaian tarif setelah melakukan kajian akademik bersama JKSN, Menkeu RI, Menkes RI dan setelah menghitung bantuan pemerintah Rp 19.225,- ternyata mengalami defisit anggaran.

Apalagi dari tahun ke tahun jumlah peserta BPJS terus meningkat. Dari, sebelumnya 94 juta orang, kini sudah lebih dari 100 juta orang, sehingga pemerintah mengalami defisit Rp 9,9 triliun. "Kalau defisit ini terus terjadi dan tidak ada uangnya, maka BPJS akan bangkrut. Karena itu naik menjadi Rp 36 ribu. Jadi, memang harus ada perubahan dan perbaikan secara drastis khususnya pelayanan pasien,"

ujarnya.

Gaji dokter pun masih ada yang Rp 200 ribu dan ada pula yang Rp 120 juta/bulan. Karena itu ada remunerasi agar tidak terjadi ketidakadilan. "Jadi, pemerintah, dan BPJS sendiri tak ada niat untuk menyulitkan pelayanan masyarakat, sehingga semua harus diperbaiki dan ditingkatkan. Di mana Indonesia menjadi penanggung jawab terbesar untuk asuransi



Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Iqbal Saat Dialektika Demokrasi

kesehatan di dunia," tambahnya.

Khusus untuk dokter selama 2 tahun terakhir ini menurut survei kata Bayu Wahyudi, dalam melayani pasien tersebut baru pada tahap pemeriksaan (29 %), dan selebihnya hanya ditanya dan dirujuk ke rumah sakit terkait, tanpa pemeriksaan. "Jadi, kita akan terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya.

Sementara, Indra Munazwar menegaskan penolakannya agar Perpres No.10 tahun 2016 tersebut dibatalkan, karena terdapat ketidakadilan pada masyarakat yang tidak mampu. Apalagi sampai saat ini dari 130 BUMN tidak satu pun yang menjadi anggota BPJS Kesehatan. Padahal, kalau itu dilaksanakan, maka tak akan ada defisit anggaran BPJS.

"Data penerima bantuan iuran (PBI) saja tidak akurat, karena tidak melibatkan pemerintah daerah, termasuk lurah setempat. Seharusnya agar jumlah rakyat miskin itu benar, akurat, melibatkan Pemda termasuk lurah. Data rakyat miskin itu memang bagi pemerintah politis, karena makin besar jumlah rakyat yang miskin, maka pemerintah telah gagal," jelas Indra

melindungi produk yang dihasilkan para pelaku UKM di Dolly dari plagiat dan sejenisnya.

Selain meninjau, di sentra industri kerajinan Dolly, tim kunjungan kerja Komisi VIII seperti Kuswiyanto, Abdul Fikri Faqih, Choirul Muna, An'im Mahrus, H.Anda, Achmad Mustaqim, Suasana Daichi, Khotibul Umam Wiranu, dan M Lutfi tak lupa juga membeli sejumlah produk yang dihasilkan. Seperti batik, baju, sepatu serta beberapa makanan ringan

(ayu), foto: ayu/hr

(se), foto: jay/hr



Renstra Sinergikan Kerja Kesetjengan dengan Anggota Dewan

Inspektur Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal DPR-RI, Setyanta Nugraha menjelaskan tentang cara mensinergikan kerja Sekretariat Jenderal DPR-RI dengan fungsi Anggota Dewan. Menurutnya ada keunikan kerja relasi kesetjengan DPR dengan organisasi-organisasi pemerintah lainnya.

Di satu sisi Kesetjengan DPR merupakan aparatur pemerintah, yang dalam tatanan trias politika merupakan eksekutif negara, namun di sisi lain Kesetjengan DPR juga mengurus kebutuhan legislatif negara. Setyanta atau akrab dengan sapaan Toto mengatakan, untuk mensinergikan fungsi itu Setjen DPR dan BURT menyusun Rencana Strategi Lima Tahunan (Renstra).

"Untuk mensinergikan itu kita memiliki Renstra, jadi DPR itu sendiri atas inisiasi Sekretariat Jenderal dengan BURT punya Renstra, sebetulnya untuk mensinergikan bagaimana mengelola kegiatan dan keuangan negara," jelas Toto

saat diwawancarai usai kunjungan studi di Irjen Kementerian Keuangan, Senin, (28/3/2016).

Kemudian dari Renstra tersebut dijabarkan dalam kerja tahunan untuk dijadikan dasar sinergitas pengelolaan kinerja Setjen DPR dengan apa yang diinginkan oleh Anggota Dewan yang dipilih rakyat.

Toto juga mengungkapkan, Inspektur Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal DPR-RI adalah aparat pengawas pemerintah, tetapi Sekretariat Jenderal juga merupakan pengelola keuangan negara, mengelola dana yang digunakan oleh para Anggota Dewan. Sedangkan di sisi lain Anggota Dewan masuk dalam posisi trias politika sebagai legislatif negara, yang tidak dimungkinkan secara langsung mengelola keuangan negara. Karena ini merupakan tugas eksekutif negara.

"Karena itu kita memeriksa dan mengawasi pengelolaan Sekjen yang di dalamnya terdapat anggaran atau uang

yang digunakan dewan, nah inilah uniknya. Ada perbedaan pemahaman antara eksekutif dan legislatif," ungkap Toto menerangkan.

Dia juga memaparkan bahwa keunikan organisasi Irtama ini adalah tingkat eselon tiga, kemudian menjadi eselon satu. Dengan jabatan setingkat eselon satu jadi tanggung jawabnya pun menjadi lebih luas ■

(eko), foto:jay/hr.



Inspektur Utama Setjen DPR RI Setyanta Nugraha

Endang Srikarti Tinjau Tanggul Jebol di Boyolali

Akibat diguyur hujan deras, tanggul di Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali, akhirnya jebol. Ini sangat merugikan para petani setempat, karena lahan sawahnya terendam luapan air sungai. Anggota DPR RI Endang Srikarti Handayani meninjau langsung tragedi jebolnya tanggul tersebut di wilayah yang menjadi dapilnya sendiri.

Politisi Partai Golkar ini sekaligus menyerukan agar semua Anggota DPR RI dari dapil Jateng V (Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Solo) bersatu untuk

memperbaiki tanggul jebol ini agar tanaman padi milik petani setempat bisa diselamatkan. "Kita berharap semua Anggota DPR RI dari Dapil Jateng V, DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan DPRD Kabupaten Boyolali, bisa ikut s a m a - s a m a membantu," katanya, Minggu (27/3).

Bersama lurah dan



Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Meninjau Tanggul Jebol



Overkapasitas, DPR Minta Lapas Di Sulteng Ditambah

Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi III DPR Supratman Andi Agtas mengatakan terkait overkapasitas yang hampir terjadi di setiap lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia, Komisi III DPR meminta Kemenkumham menambah lapas di Provinsi Sulawesi Tengah.

"Overkapasitas di lapas sudah menjadi hal yang biasa di sebabkan kemampuan negara untuk membiayai pembangunan lapas masih sangat terbatas, oleh karena itu saya meminta kepada Menteri Hukum dan HAM untuk bisa menambah lagi lapas di Sulawesi Tengah," jelas Supratman usai meninjau Lapas Kelas II A Petobo, Palu, Sulteng, Senin (22/3/2016).

Menurut Supratman, di Indonesia sendiri baru ada sekitar 477 lembaga pemasyarakatan, dimana setengah dari yang seharusnya dimiliki yakni kurang lebih 1000 lapas, sedangkan overkapasitas di Indonesia sendiri sudah mencapai 100 persen.



Tim Kunker Komisi III DPR RI meninjau Lapas di Sulteng

Sementara itu, dalam tinjauannya, Tim Kunker Komisi III meninjau sejumlah blok yang ada di Lapas tersebut diantaranya blok wanita, dimana didalam blok tersebut kasus yang paling menonjol adalah napi yang tersangkut kasus narkoba.

Selanjutnya tim bergegas ke ruangan instruktur dimana ruangan tersebut di gunakan para warga binaan masyarakat baik wanita maupun laki-laki diberikan pelatihan untuk bisa membuat ketrampilan dalam hal mengolah kerajinan tangan yang

camat setempat, Endang melihat tanggul yang dibendung sementara dengan menggunakan tumpukan karung pasir dan bambu. Bahkan, di lokasi kejadian, Anggota Komisi VI DPR ini menghubungi langsung Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera bergerak memberi bantuan perbaikan tanggul. "Ayo kita sama-sama memberikan dorongan kepada semua pihak terkait, agar segera turun tangan memperbaiki saluran air yang rusak."

Endang berharap, lurah dan camat setempat segera mengajukan proposal bantuan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boyolali supaya bisa ditindaklanjuti oleh BNPB. Akibat jebolnya tanggul ini, puluhan hektar lahan pertanian rusak karena terendam air. Untuk meninjau titik lokasi tanggul yang jebol, Endang bersama rombongan harus

menempuh perjalanan dengan sepeda motor, karena jalan yang sempit.

Panjang tanggul yang rusak sekitar 20 meter dari 700 meter panjang keseluruhan. Bila tidak segera diperbaiki, tanggul sementara yang dibuat secara swadaya ini bisa rusak kembali. Seperti diketahui, saluran air yang tanggulnya jebol itu melewati tujuh desa, yaitu Karangjati, Banyuasri, Bandung, Wonosegoro, Ketoyan, Gosono, dan Bolo ■

(mh) foto: dok/ed

terbuat dari kayu-kayu, barang-barang bekas, dan pengelasan besi. Peninjauan Tim berakhir di lapas Tipikor.

Disana sejumlah Anggota Komisi III berkesempatan berdialog dengan para penghuni lembaga pemasyarakatan untuk mendengarkan cerita mengenai keberadaan mereka di lapas.

Usai berkeliling lapas, Supratman memberikan apresiasinya kepada Lapas II A Petobo, "Kami memberikan apresiasi, ini sangat membanggakan, para narapidana pun hampir semua yang saya temui merasa puas, meski overkapasitas, dan kondisi lingkungan lapas menurut mereka juga cukup baik" ungkap Supratman.

Hal senada di sampaikan anggota Komisi III Wenny Warouw menurutnya fasilitas yang tersedia di lapas kelas II A Petobo cukup baik dan bersih, sistem masuk tidak lagi menggunakan sistem manual namun sudah memakai sistem komputer. Politikus asal F-Gerindra mengharapkan kepada semua lapas di Indonesia bisa mencontoh lapas Petobo tersebut.

Dalam paparannya di hadapan Komisi III DPR, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah Bambang Haryono menerangkan lembaga pemasyarakatan kelas II A Palu Petobo belum memenuhi standar, salah satunya mengenai kapasitas lapas yang seharusnya digunakan untuk 210 narapidana kini digunakan kurang lebih 432 orang narapidana

Terlebih lagi, ujar Bambang, mengenai persoalan pencairan biaya makan (BAMA) yang menjadi masalah, dimana anggaran BAMA tidak cukup untuk satu tahun anggaran, "Di tahun 2016 anggaran BAMA tidak tersedia dengan jumlah penghuni riil pada Lapas atau Rutan, sehingga tidak mencukupi hingga akhir tahun," tegas Bambang.

Pendapat berbeda di sampaikan Kepada divisi Pemasyarakatan Sulteng Sarlota Merahbia yang mengusulkan kepada Pemerintah selaku Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar mempunyai satu lembaga khusus lapas narkoba di Sulawesi Tengah sehingga ada pemisahan antara narapidana umum dan narkoba ■

(rmi/mh), foto : rum/hr



DPR Dorong Kemendikbud Tambah Infrastruktur UNBK

Ujian Nasional (UN) tahun ini, setidaknya diikuti oleh 7,2 juta murid di jenjang SMP/Mts hingga SMA/SMK/MA. Sejumlah 927 ribu murid yang tersebar di 4.402 sekolah memakai sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Penyelenggara UN diharapkan semakin menambah infrastruktur UNBK.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra mengatakan, pihaknya terus mendorong langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku penyelenggara UN, untuk terus menambah jumlah sekolah peserta UNBK. Mengingat, komitmen Kemendikbud menuntaskan seluruh sekolah menggunakan sistem UNBK pada tahun 2018.

"Walaupun terlambat untuk menggunakan ujian berbasis komputer, namun langkah yang diambil Kemendikbud, kita perlu berikan apresiasi dan dorongan, agar setiap tahunnya, jumlah sekolah yang menggunakan UNBK itu meningkat," kata Sutan, ketika dikonfirmasi Parlemenaria melalui sambungan telepon, Selasa (29/3/2016).

Politisi F-Gerindra itu menjelaskan,

dengan semakin banyaknya sekolah yang memakai UNBK, tingkat integritas kelulusan juga seiring akan meningkat, karena tidak ada lagi contek-mencontek. Sehingga, kekurangan komputer yang masih sangat kurang di banyak sekolah, diharapkan segera dapat dituntaskan.

"Kita juga mengharapkan agar angka kejujuran juga semakin tinggi. Permasalahan kurangnya komputer, pemadaman listrik, *software*, kami dorong untuk segera dibenahi. Penggunaan komputer yang berganti-gantian juga mengakibatkan murid menunggu terlalu lama, dan menghilangkan konsentrasi murid," imbuh Sutan.

Politisi asal dapil Jambi itu juga berharap, permasalahan pemadaman listrik yang kerap terjadi di beberapa daerah, jangan sampai mengganggu pelaksanaan UNBK. Untuk itu, ia meminta pihak penyelenggara UN

untuk berkoordinasi dengan pihak penyedia infrastruktur listrik, agar tidak terjadi pemadaman listrik.

Menurutnya, akibat padamnya listrik ketika UN berlangsung juga dapat menghilangkan konsentrasi murid. Ia juga mengingatkan, pengamanan naskah soal ujian berbasis kertas juga patut mendapat perhatian, agar tidak terjadi kebocoran soal.

"Dengan ini, saya sebagai Pimpinan Komisi X DPR menyampaikan kepada seluruh murid untuk melaksanakan UN dengan penuh semangat, dan



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra

Potensi Perikanan Provinsi Jambi Sangat Besar



Tim Kunker Komisi IV DPR RI melihat budi daya ikan patin di Sungai Batanghari

Anggota Komisi IV DPR Sjachrani menerangkan berdasarkan informasi yang didapat, dan melihat budi daya ikan patin di sungai Batanghari, Provinsi Jambi sangat besar, dimana produksi panen bisa mencapai 25 ton sehari.

"Saya sangat mendukung, ini merupakan langkah yang strategis, selain masyarakat benar-benar memanfaatkan Sungai Batanghari untuk kehidupannya, tapi juga dimanfaatkan untuk pembudi daya ikan tananaman padi dan kegiatan pertanian lainnya,"kata

Sjachrani di Jambi, Minggu (20/3/2016).

Komisi IV, menurut Sjachrani akan menyikapi program-program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama budidaya untuk mendukung terutama petani budidaya ikan ini.

Di Jambi, Tim Kunker Komisi IV juga mengunjungi wilayah pesisir di Kabupaten Muaro Tunggal, melihat perkembangan nelayan laut. Disana tim kunker mendapat masukan, bahwa nelayan sangat membutuhkan tambahan alat tangkap dan kapal.

"Ada dua ribu nelayan di sana, dimana mereka masih kurang peralatan untuk bisa bersaing menghasilkan tangkapan ikan. Oleh sebab itu, mereka (nelayan-red) mengajukan beberapa permohonan untuk bisa meminta bantuan dari Komisi IV, untuk



menjaga integritas kejujuran," pesan politisi yang akrab dipanggil SAH ini.

Dikutip dari salah satu media nasional, pelaksanaan UN dengan kertas atau komputer untuk SMA akan dilaksanakan pada 4-6 April. Khusus untuk SMK akan digelar sampai 7 April. Dan ujian susulan akan dilangsungkan pada 11-13 April untuk SMA, dan 14 April untuk SMK.

Kepala Pusat Pendidikan Kementerian dan Kebudayaan, Nizam, mengatakan, karena jumlah komputer masih terbatas, tahun ini rasio komputer dan peserta sebesar 1:5. Ia berjanji, ke depannya, rasio akan didorong menjadi 1:6 supaya lebih banyak yang menggunakan UNBK.

Nizam menambahkan, di semua provinsi, jumlah pengguna UNBK bertambah. Sekolah peserta UNBK tahun ini meningkat drastis dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 554 sekolah. "Namun, peningkatan tersebut bukan karena banyak sekolah membeli komputer baru, melainkan karena mereka bersedia berbagi komputer dengan sekolah lain," imbuhnya ■

(sf), foto: azka/hr.

ditindaklanjuti dalam rapat komisi dengan Pemerintah," papar Sjachrani politisi dari Partai Gerindra ini.

Namun demikian, tambahnya, Komisi IV juga meminta kepada Pemerintah Daerah memanfaatkan sebaik-baiknya bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah.

Seperti diketahui, dalam masa reses persidangan kali ini, Komisi IV DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya, melakukan sejumlah kunjungan kerja ke berbagai daerah, salah satunya ke Provinsi Jambi, dimana sejak hari Sabtu (19/3/2016), tim Kunker Komisi IV DPR RI sudah menjejakan kakinya di Jambi, kedatangan mereka untuk melihat beberapa obyek berkaitan dengan mitra kerja Komisi IV ■

(as,nt) foto: agung/hr.

Komisi III DPR Dengar Keluhan Napi Terkait Diskriminasi Pemberian Remisi



Tim Kunker Komisi III DPR RI meninjau Lapas Sukamiskin Bandung

Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi III DPR melakukan peninjauan ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Selasa (22/3/2016). Dilapas, Tim Komisi III juga berkesempatan melakukan dialog dengan para napi, diantaranya napi kasus korupsi yang mengeluhkan adanya diskriminasi dalam penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012 tentang Pemberian Remisi.

Anggota Tim Kunker Adies Kadir mengatakan, masukan dan kritikan tentang PP No. 99 Tahun 2012 tidak hanya didapatkan di Lapas Sukamiskin saja, tetapi hampir disetiap kunjungan Komisi III ke Lapas, para tahanan Khusus (narkotika, terorisme dan koruptor) mengeluh karena tidak adanya remisi.

Adies menjelaskan, PP ini memang harus dikaji lebih dalam oleh pemerintah, sebab di negara-negara lain semua pelanggaran pidana mendapatkan remisi, "Pemberian remisi merupakan hak asasi setiap manusia, sementara pemerintah menganggap bahwa para tahanan khusus merupakan kejahatan ekstra

sehingga tidak ada remisi," jelasnya.

"Pemerintah perlu memperhatikan unsur-unsur Hak Azasi Manusia (HAM) untuk para pidana khusus. Karena setiap warga negara harus mendapatkan HAM. Apalagi di lapas ini tempatnya

membina, berarti ada target dalam pembinaan itu apabila di dalam pembinaan tahanan menunjukkan etika baik saya rasa bisa diberikan remisi tetapi mungkin tidak sebesar remisi yang didapat napi kasus pidana umum," sambungnya.

Sebaliknya dipidana umum, terang Adies, katakanlah jika ada yang melakukan kejahatan pembunuhan, jangan langsung pemerintah memberikan remisi, tapi perlu dibuat syarat khusus terlebih dahulu.

"Itu yang kami tangkap dari warga binaan yang menceritakan unek-uneknya. Jadi dibandingkan pembunuh sadis dan brutal mendapat remisi tetapi mereka yang ditangkap karena korupsi, meski berkelakuan baikpun tidak ada *reward* yang mereka dapatkan. Itu yang menjadi protes mereka (napi koruptor-red)," tambahnya.

Politisi Golkar ini juga menegaskan kembali bahwa remisi itu hak setiap orang yang sudah memenuhi syarat itu harus diberikan. "Lapas dan Rutan saat ini bukan lagi menjadi tempat penghukuman tapi sebagai tempat membina orang," pungkasnya ■

(mm,nt) foto: ria/hr.



Komisi VIII DPR RI Kunjungi Rumah Trauma Centre di Tanjungpinang

Tim Kunker Komisi VIII DPR RI mengunjungi Rumah Trauma Centre (RPTC) di Jalan Transito Senggarang Tanjungpinang pada Selasa (22/03/2016) siang. RPTC dikhususkan bagi Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) yang dideportasikan atau diusir dari Malaysia.

Dalam kunjungan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amaliah bersama rombongan Tim Kunker Komisi VIII meninjau seluruh ruangan yang ada di RPTC tersebut dan melakukan dialog langsung dengan TKIB, kader PKS tersebut terenyuh dan langsung menghampiri TKIB yang mempunyai bayi juga yang sedang hamil di Rumah Penampungan Trauma Center (RPTC) tersebut.

Di hadapan para TKI bermasalah, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amaliah meminta, agar para mantan TKI tidak kembali bekerja di luar negeri bila belum siap.

"Kami dari Komisi VIII DPR RI meminta dengan sangat kepada Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB), tidak kembali lagi ke Malaysia, tetapi menjadi tenaga produktif di sektor pertanian atau sektor



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah meninjau RPTC di Tanjungpinang

informal di sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang sedang membutuhkan banyak tenaga kerja di Indonesia," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amaliah di hadapan para TKI dan para mitra komisi VIII DPR.

Lebih lanjut Ledia meminta di RPTC Tanjungpinang ini perlu di perbanyak psikolog dan Kanwil Kementerian Agama di Tanjungpinang untuk memberikan tausiah kepada TKIB untuk melakukan bimbingan koseling memberi pemahaman kepada TKIB agar tidak kembali bekerja di luar negeri.

Di kesempatan yang sama Direktur RPTC Tanjungpinang Sony Manalu menuturkan, dari data yang diperoleh Kementerian Sosial, jumlah TKIB yang deportasi seminggu yang lalu dari Malaysia yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia, yang kini ditampung RPTC di Tanjungpinang, sebanyak 250 orang, didalamnya terdiri dari laki-laki, perempuan serta 2 bayi, dan 2 ibu hamil.

Dan jumlah TKIB yang berhasil di pulangkan dari tahun 2005 - 2015 sebanyak 241,997 orang dengan rincian laki-laki 172,283 orang dan perempuan 69,714 orang jumlah ini akan terus bertambah tiap tahunnya.

Usai menerima penjelasan dari Direktur RPTC, Anggota Komisi VIII Wenny Haryanto dari Fraksi Golkar yang ikut serta dalam rombongan, seketika memeluk seorang TKI bermasalah di Rumah Penampungan Trauma Centre di Tanjungpinang, Suasana haru pun menyeruak ■

(ndri,nt) foto : andri/mr

DPR Apresiasi Kinerja BNN



Tim Kunker Komisi III DPR RI Kunjungi Polda Jawa Barat

Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengapresiasi kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) yang semakin meningkat. Menurutnya, BNN kini tidak hanya mampu membongkar jaringan narkoba di lapas saja tetapi juga jaringan antar negara, bahkan pejabat negara pun menjadi sasarannya.

"Ini menunjukkan keseriusan BNN dalam memberantas narkoba, sehingga perlu mendapat dukungan yang penuh," kata Habib Aboe Bakar saat Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi III DPR ke Polda Jawa Barat, Rabu (23/3/2016).

Lebih lanjut Politisi PKS ini menjelaskan, peningkatan status BNN adalah langkah maju dalam melaksanakan pemberantasan Narkoba,



Setjen DPR Gelar Seminar Penanggulangan Stress

Rutinitas dan tanggung jawab pekerjaan terkadang membuat stress, tak terkecuali dengan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Atas dasar itu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPR RI menggelar seminar kesehatan bertajuk "penanggulangan stress di tempat kerja".

"ASN (aparatur sipil negara) di lingkungan DPR RI yang notabene sebagai pendukung utama dewan, dituntut untuk terus sehat. Padahal tak dapat dipungkiri beban dan tanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut terkadang bisa membuat stress. Oleh karena itu hari ini Pusdiklat Setjen DPR RI menggelar seminar penanggulangan stress di tempat kerja. Salah satu tujuannya tentu tak lain adalah untuk mengantisipasi sekaligus menanggulangi terjadinya stress," ujar Sekjen DPR, Winantuningtyastiti, saat membuka seminar di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (29/3).

Pada kesempatan itu tampil sebagai pembicara Irmansyah yang tak lain adalah



Suasana Seminar yang di selenggarakan Setjen DPR RI

dokter jiwa dari Universitas Indonesia yang sejak 2013 lalu bergabung dalam unit layanan kesehatan DPR RI. Selain Irmansyah, tampil pula psikiater RA Oriza Sativa yang ikut menjadi pembicara dalam seminar yang dimoderatori oleh Happy Apriyanti ini.

"Stress merupakan respon yang merugikan yang dimiliki oleh seseorang terhadap adanya tekanan yang berlebihan atau diluar batas. Sumber stress bermacam-macam, bisa dari pikiran, perasaan dan tindakan yang kesemuanya itu bisa

disebabkan dari berbagai hal, misalnya rekan kerja yang kurang bisa berkompromi, atasan yang kurang bisa menghargai, mutasi dan segala macamnya," jelas Oriza.

Ditambahkan Oci, begitu panggilan Oriza, setiap orang bisa mendeteksi secara dini apakah terkena stress di tempat kerja lewat beberapa ciri-ciri, yakni seperti aktivitas harian yang terganggu, tidak bisa *perform*, mengkritik sikap atasan secara berlebihan dan sebagainya. Sementara itu Irmansyah menjelaskan

beberapa masalah kesehatan jiwa yang kerap terjadi ditempat kerja. Misalnya, gangguan hubungan interpersonal baik dengan pasangan, dengan rekan sekantor dan hubungan dengan atasan atau bawahan, depresi, cemas bahkan bisa berujung pada keluhan fisik berulang dan berpindah-pindah, tanpa bukti klinis dan laboratorium meminta berbagai pemeriksaan canggih.

"Alhamdulillah hampir dua tahun ini DPR RI bersama pemerintah berhasil membuat UU NO.18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Bahkan sejak empat tahun yang lalu APEC terus membahas tentang kesehatan jiwa di tingkat ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa seberapa penting kesehatan jiwa mendukung kinerja sebuah lembaga atau instansi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perekonomian sebuah negara," papar Irmansyah.

Irmansyah dan Oci sependapat untuk mencegah terjadinya stress adalah dengan membiasakan diri bersikap relaks atau tenang, istirahat yang cukup, dan jangan ragu untuk konsultasi ke psikiater atau dokter jiwa jika sudah terlihat atau merasakan adanya indikasi stress.

"Langkah terakhir adalah dengan psikofarma berupa pemberian obat-obat anti depresan, anti anxietas, dan anti psikotik. Untuk langkah ini hanya bisa dilakukan oleh dokter jiwa, bukan psikolog," pungkas Irmansyah

saat ini status BNN yang setara dengan Kementerian diharapkan akan memperkuat upaya negara ini untuk perang melawan narkoba.

"Ini adalah pilihan yang tepat di saat Indonesia sedang mengalami darurat narkoba. Saya berharap dengan kenaikan status ini pula kinerja BNN akan semakin meningkat." tambahnya.

Setidaknya ada tiga nilai plus ketika BNN dinaikkan sekelas kementerian. Pertama, meningkatnya pola komunikasi dengan lembaga lain, karena posisinya lebih sejajar dengan kementerian. Tentunya dengan kondisi ini diharapkan kerja sama yang baik lintas lembaga dalam pemberantasan narkoba dapat ditingkatkan.

Kedua, daya dukung Sumber Daya

Manusia (SDM) juga akan bertambah. Sehingga kegiatan pencegahan maupun penindakan akan semakin meningkat dan ketiga, daya dukung anggaran juga akan disesuaikan. Karena terjadi kenaikan *grade* kelembagaan, maka anggaran yang diberikan harus disesuaikan.

Ketiga perubahan ini menurut Politisi dapil Kalsel I akan memberikan *power* yang lebih kepada BNN untuk meningkatkan kinerja. Baik dalam proses pencegahan, peredaran narkoba maupun proses penindakannya. "Sehingga diharapkan dengan hal itu akan mampu menekan peredaran narkoba di Indonesia dan tentunya dapat menyelamatkan generasi muda kita dari pengaruh narkoba," tegasnya

(rmm,nt), foto:ria/hr

(ayu), foto: kresno/hr



Representasi Pemuda di DPR Masih Minim

Proporsi anggota DPR yang berusia muda masih terbilang minim. Badan Parlemen Dunia, Inter-Parliamentary Union (IPU) mencatat bahwa DPR berada di urutan ke 33 dalam hal proporsi anggota parlemen usia di bawah 30 tahun dengan persentase sekitar 2,9%, urutan ke-51 bagi parlemen usia di bawah 40 tahun (17,9%), dan urutan ke-37 bagi parlemen usia di bawah 45 tahun (37,7%).

Temuan tersebut terungkap dalam laporan IPU Youth Participation in National Parliaments 2016 pada Third Global Conference of Young Parliamentarians, yang digelar di Lusaka, Zambia, 16-17 Maret 2016 lalu. Data representasi pemuda di parlemen ini dikumpulkan IPU dari sedikitnya 128 parlemen di dunia. Bila merujuk pada definisi pemuda di UU No.40/2009 tentang Kepemudaan, disebutkan kategori pemuda hanya sampai usia 30 tahun.

Dengan batasan itu, keterwakilan anggota DPR muda, usia di bawah 30 tahun masih terbilang minim. Dalam pertemuan ini, delegasi DPR RI diwakili Charles Honoris yang aktif terlibat diskusi



Anggota BKSAP DPR Siti Masrifah di Sidang IPU ke-134 Lusaka, Zambia

mendalam menyangkut isu pemuda ini. Charles berpendapat bahwa pelibatan pemuda dalam beragam isu sangat penting.

"Kita perlu melibatkan lebih banyak pemuda melalui beragam arena termasuk di media-media non-konvensional seperti di media sosial," urai Charles saat berdiskusi mengenai topik model ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi para pemuda (*economic model that is fairer and sustainable for youth*). Politisi PDI Perjuangan itu juga mendorong peningkatan pemahaman dan informasi mengenai lingkungan ketika berdiskusi tentang perubahan iklim (*protecting the planet*).

Kesadaran publik dalam perubahan iklim, sambung Charles, perlu digugah secara masif. Mendorong perubahan iklim dalam pendidikan juga adalah langkah yang signifikan. "Ini penting untuk meningkatkan kesadaran publik. Sebagai contoh, banyak masyarakat Indonesia tidak mengeluh soal kebakaran hutan. Ini menjadikan situasi bertambah parah," urainya.

Konferensi IPU ini menghasilkan beberapa rekomendasi, diantaranya, mendorong pemerintah memasukkan perspektif pemuda dalam pembangunan dan memastikan dampaknya terasa bagi para pemuda. Rekomendasi lainnya adalah berkomitmen meningkatkan kemitraan dengan organisasi kepemudaan agar dapat menjadi jembatan aspirasi para pemuda dalam pengambilan kebijakan dan legislasi.

Selain rangkaian Konferensi Global Anggota Parlemen Muda, delegasi DPR



Delegasi Parlemen Indonesia di Sidang IPU ke-134 di Lusaka, Zambia

juga ambil bagian dalam seri persidangan IPU ke-134 pada 19-23 Maret 2016 di Lusaka, Zambia. Pada Forum Parlemen Perempuan (*Meeting of Women Parliamentarians*), delegasi DPR yang diwakilkan Siti Masrifah, menyampaikan pandangan mengenai pentingnya memberikan kesempatan bagi para perempuan muda berpartisipasi secara bebas dan aman dalam politik. "Hal ini membuka ruang kontribusi bagi mereka dalam pembangunan bangsa," tandas dia.

Topik utama pertemuan parlemen perempuan tersebut adalah memberikan perspektif wanita dalam isu utama persidangan IPU ke-134, yakni *Rejuvenate Democracy: Giving Voice to the Youth*. Menurut Masrifah populasi perempuan adalah setengah dari jumlah penduduk dunia. Dengan demikian keterwakilannya di politik sangat penting.

"Adanya kepentingan, kebutuhan, dan pengalaman khusus bagi perempuan yang tidak dapat diwakilkan oleh laki-laki, menjadi faktor pendorong majunya perempuan dalam politik," ujar anggota BKSAP DPR RI ini.

Dalam kesempatan lain, Delegasi DPR yang terdiri dari Fadli Zon (Ketua Delegasi), Rofi Munawar dan Syaifullah Tamliha (Wakil Ketua BKSAP), Charles Honoris, Dave Laksono, dan Sudin menghadiri pertemuan grup regional ASEAN+3, pada 19 Maret 2016. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Thailand, dengan agenda utama membicarakan pandangan-pandangan organisasi dalam perspektif ASEAN+3 di IPU ■



Komisi V DPR Soroti Pembangunan Jembatan Teluk Kendari

Tim Kunker Komisi V DPR RI dipimpin Michael Wattimena berdialog dengan Gubernur Sulawesi Tenggara

Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR yang dipimpin oleh Michael Wattimena menyoroti pembangunan jembatan Bahteramas Teluk Kendari. Dikemukakan politisi Partai Demokrat itu, dengan adanya pembangunan jembatan tersebut akan membuat estetika kota Kendari lebih indah dan menarik karena terletak dipusat kota.

"Kami sudah melihat dari dekat proses penyiapan daripada pembangunan jembatan Teluk Kendari. Ini adalah sebuah program Pemerintah Provinsi Sultra yang sudah direncanakan cukup lama dan akan dijalankan dalam waktu dekat sehingga bisa menghubungkan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya," pungkas Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena saat Tim Kunker meninjau Jembatan Teluk Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (21/3/2016).

Sebagaimana diketahui, Jembatan Teluk Kendari memiliki panjang 1,3 kilometer yang akan menghubungkan Kota Lama dengan Poasia. Dengan adanya jembatan tersebut diharapkan dapat mengembangkan aktivitas pelabuhan peti

kemas dan kawasan industri daerah Lapulu dengan menghemat biaya operasi kendaraan serta mempersingkat jarak tempuh dari kedua kota. Proyek tersebut merupakan proyek *multiyears contract* senilai Rp 729 miliar, telah dimulai Februari 2015 lalu dan ditargetkan rampung pada akhir 2018.

Adapun kendala dalam pembangunan jembatan tersebut, seperti yang disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam antara lain pembebasan lahan di Kota Lama dan Poasia yang belum tuntas dan kegiatan pembersihan logam berbahaya (ranjau laut) di sepanjang trase jembatan belum dilakukan sehingga pekerjaan air juga belum dapat dilakukan.

Sementara itu, berkaitan dengan aktivitas relokasi kapal *container* milik Pelindo yang akan dilewati proyek pembangunan Jembatan Teluk Kendari. Michael meminta agar pemerintah setempat mengantisipasi hal-hal yang bisa berpotensi menjadi kendala di kemudian hari.

"Semuanya direlokasi secara arif dan

bijaksana, jangan sampai menimbulkan *conflict of interest* dalam alur kapal yang nantinya akan berimplikasi pada pembangunan jembatan kendari itu sendiri," jelas Michael.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Kunker meninjau sarana dan prasarana pelabuhan BASARNAS yang ingin fasilitasnya ditingkatkan karena dinilai panjang pelabuhan yang ada saat ini tidak sebanding dengan panjang kapal. Dimana pelabuhan tersebut hanya memiliki panjang 40 meter sementara panjang kapal 60 meter. Tim Kunker Komisi V DPR juga melihat secara langsung dermaga Bungkutoko yang dalam waktu dekat akan diresmikan oleh Presiden.

Turut hadir anggota Komisi V Umar Aرسال (F-PD), Salim Fakhry (F-PG), Ridwan Bae (F-PG), Agati Sulie Mahyudin (F-PG), Anthon Sihombing (F-PG), Andi Iwan Darmawan Aras (F-P Gerindra), Agung Budi Santoso (F-PD), Anton Sukartono Suratno (F-PD), Bahrum Daido (F-PD), Yasti Soepredjo Mokoagow (F-PAN), Hanna Gayatri (F-PAN), Sigit Sosiantomo (F-PKS) dan Ahmad H.M. Ali (F-P Nasdem) ■

(amr/nt), foto: anne/hr



BERITA BERGAMBAR



Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke lapas II A Petobo di Sulteng (Palu), Senin (21-3-2016)
Foto-Runi



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron bersama perwakilan Bulog mengangkat karung gabah di gudang Bulog Sumbawa NTB, Rabu (23-3-2016)
Foto-Naefuroji



Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo bersama anggota Komisi IV Hamdani dan Bupati Pulang Pisau, Kalteng memancing ikan patin. Rabu (23-3-2016)
Foto-Husen



Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meninjau sarana dan prasarana Bandara Haluoleo di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (21-3-2016) Foto-Anne



Komisi VIII DPR RI meninjau sentra industri UKM di bekas lokalisasi Dolly Jatim, Senin (21-3-2016)
Foto-ayu



Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI meninjau ruang laboratorium pelaksanaan UNBK di SMAN 3 Sorong, Papua Barat, Senin (21-3-2016) Foto-Sofyan

